

ANTARA BALI

Membangun Karakter Masyarakat Berbasis Informasi Akurat



PERDA LARANGAN ALIH FUNGSI LAHAN DIBAHAS TAHUN INI

PEMKAB GIANYAR
KEMBANGKAN
DIGITALISASI
PERLINDUNGAN
PEKERJA MIGRAN

Hal. 4



BUPATI BADUNG
INSTRUKSIKAN
EVALUASI TATA
RUANG UNTUK
CEGAH BANJIR

Hal. 8



HAL
2

Gubernur Bali: Perda Larangan Alih Fungsi Lahan Dibahas Tahun Ini

Gubernur Bali Wayan Koster memastikan tahun ini akan mulai membahas peraturan daerah tentang larangan alih fungsi lahan merespons arahan dari Menteri Lingkungan Hidup yang melihat konversi lahan menjadi salah satu penyebab banjir besar.

"Mulai tahun ini, (menggarap perda) iya, sudah ada instruksi kepada Bupati dan Wali Kota se-Bali," ucapnya di Denpasar, Minggu.

"Dan setelah penanganan banjir ini, kita akan kumpul lagi agar tidak lagi mengeluarkan izin, memberikan izin untuk hotel, restoran, fasilitas-fasilitas lain menggunakan lahan produktif apalagi sawah," sambung Wayan Koster.

Dengan diprosesnya perda tahun ini maka ditargetkan kebijakan ini mulai berjalan pula 2025 sesuai dengan Haluan Pembangunan 100 Tahun Bali Era Baru yang mulai berlaku 2025-2125.

"Mulai tahun ini (larangan alih fungsi lahan) sesuai dengan haluan Bali 100 tahun, mulai 2025

sudah tidak boleh lagi ada alih fungsi lahan produktif untuk menjadi fasilitas komersial," ujarnya.

Sementara itu untuk alih fungsi menjadi tempat tinggal pribadi, Pemprov Bali akan memberlakukan izin selektif, dimana yang boleh membangun hanya warga pemilik lahan dan hanya untuk rumah, bukan bangunan komersil.

Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq menjelaskan bahwa salah satu penyebab Bali tidak dapat menahan tingginya intensitas hujan hingga terjadi banjir besar pada Rabu (10/9) lalu adalah kurangnya tutupan hutan di daerah aliran sungai (DAS) dari hulu.

Oleh karena itu ia sangat mendukung langkah moratorium pembangunan atau membuat



Gubernur Bali Wayan Koster bahas penolakan pengembangan kasino untuk pariwisata budaya Bali di Denpasar, Sabtu 16/8/2025. (ANTARA/Ni Putu Putri Muliartari)

larangan alih fungsi lahan produktif menjadi komersil terutama akomodasi pariwisata.

Pun juga langkah ini demi pariwisata Bali sebab bencana banjir besar turut menjadi sorotan.

"Saya sebenarnya sudah ngomong ke pak Gubernur minggu kemarin ya, saya sangat berharap bapak gubernur segera meng-

hentikan konversi-konversi lahan di Bali, penting sekali ini," ujar Menteri LH.

Terhadap gedung-gedung yang sudah ada, ia serahkan ke Pemprov Bali bagaimana penanganannya, tidak dapat dilakukan sembarang namun faktanya penting bagi ketahanan Bali sebagai pulau kecil. (ant)

Wagub Bali Akui Pembangunan Masif Berdampak Pada Banjir



Wakil Gubernur Bali I Nyoman Giri Prasta diwawancara soal dampak pembangunan masif terhadap banjir besar di Bali, Denpasar, Kamis 11/9/2025. (ANTARA/Ni Putu Putri Muliartari)

WAKIL Gubernur (Wagub) Bali I Nyoman Giri Prasta mengakui pembangunan yang masif menjadi salah satu penyebab banjir yang melanda Bali terutama Denpasar, Badung, Gianyar, dan Jembrana pada Rabu (10/9) kemarin.

"Pasti, pasti ada dampak (pembangunan masif), semuanya ada

dampak, cuma kita harus berpikir bagaimana kita mencari solusi," kata dia usai meninjau posko pengungsian korban banjir di Denpasar, Kamis.

Alih-alih saling menyalahkan, Wagub Giri menjadikan banjir besar kemarin sebagai evaluasi dari maraknya alih fungsi lahan

dan perubahan iklim yang seketika terjadi.

"BNPB sudah menyampaikan air hujan yang semestinya turun untuk sebulan, ini turunnya itu hanya satu setengah hari, ini luar biasa memang, tapi kita tidak akan pernah menyalahkan siapa-siapa, mari kita berbenah dan segala sesuatu itu akan kita perbaiki dengan baik," ujarnya.

Selain menjanjikan perbaikan, Pemprov Bali juga menjamin akan dilakukan pembatasan pada alih fungsi lahan.

"Sudah pasti, alih fungsi lahan sudah pasti ada pembatasan," ucapnya singkat.

Namun untuk saat ini mengingat Bali telah berstatus tanggap darurat bencana, Giri Prasta mengatakan Pemprov Bali lebih awal mengeluarkan arahan mitigasi untuk mengantisipasi perubahan iklim tak terduga.

Seperti hujan intensitas tinggi

sejak Selasa (9/9) lalu yang semestinya Bali memasuki musim kemarau namun diterjang gelombang roosby dan kelvin sehingga terjadi banjir di banyak titik.

Selanjutnya Pemprov Bali bersama Pemkot Denpasar sepakat fokus berkolaborasi untuk bantuan ganti rugi, peralatan dan barang para pedagang yang hanyut dan rusak, yang diganti dari APBD Provinsi Bali dan Kota Denpasar.

"Yang kedua, bantuan penanganan pengungsi ditangani oleh Kota Denpasar, serta ada bantuan fasilitas dari BNPB yang datang hari ini, ketiga, bantuan perbaikan jalan dan jembatan yang rusak itu dari APBN," kata Giri Prasta.

Keempat, pemerintah fokus pada penuntasan pembersihan sampah, penyedotan sisa banjir terutama di pasar, dan kelima, masih memprioritaskan pencarian korban banjir yang masih hilang. (ant)

Mensos Dorong Pemberdayaan Dalam Revitalisasi Sungai di Denpasar

Menteri Sosial Saifullah Yusuf mendorong pemberdayaan masyarakat menuju wilayah yang lebih tertata dan berkelanjutan dalam proyek revitalisasi di Sungai Tukad Wang Biga, Desa Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan.

Menteri Sosial menyampaikan program ini merupakan bentuk kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan Pemerintah Kota Denpasar.

"Kita sama-sama melihat masyarakat Pemogan melakukan upaya pemberdayaan melalui rehabilitasi sosial di kawasan yang sebelumnya kumuh," katanya di Denpasar, Jumat.

Terutama persoalan sampah di sungai, kini lebih tertata sepanjang lebih dari 3 km.

Dia mengatakan revitalisasi sungai tersebut merupakan awal dari sesuatu yang baru, yakni merawat, menjaga, dan mengedukasi masyarakat agar lebih peduli terhadap lingkungan.



Menteri Sosial menambahkan program revitalisasi sungai tersebut merupakan prestasi nyata yang sudah melalui proses panjang sejak Februari 2025 hingga kini, dan akan terus diperluas hingga 6 sampai 7 km lebih.

Menteri Sosial juga mengapresiasi dukungan DPR RI, Pemerintah Provinsi Bali, serta komitmen kepala desa yang konsisten menjaga keberlanjutan program ini.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Denpasar I Kadek Agus Arya Wibawa menyampaikan terima kasih atas program revitalisasi sungai serta pemberdayaan masyarakat yang dinilai sangat bermanfaat bagi Kota Denpasar.

"Program ini tidak hanya



Menteri Sosial I Saifullah Yusuf saat meresmikan proyek revitalisasi di Sungai Tukad Wang Biga, Desa Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Jumat (12/9/2025). ANTARA/HO-Humas Pemkot Denpasar

memberikan dampak nyata pada kebersihan sungai, tetapi juga meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga lingkungan. Pemerintah Kota Denpasar siap berkolaborasi untuk memastikan keberlanjutan program ini," ujarnya.

Sebelum peresmian, Menteri Sosial menyempatkan diri meninjau kelompok keluarga penerima manfaat (KPM) di Rotary, melihat

proses pengolahan sampah dengan maggot, serta menyaksikan mesin pencacah sampah plastik karya anak Bali di TPS3R Kubu Lestari, Pemogan.

Acara dilanjutkan dengan penyerahan bantuan secara simbolis berupa Bantuan Pemberdayaan dan Rehabilitasi Sosial Kawasan Kumuh Wilayah Sungai Tukad Wang Biga Desa Pemogan senilai Rp1.413.608.349. (ant)

Denpasar Siapkan Dana Penguatan Ekonomi Bagi Usaha Terdampak Banjir



Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara saat meninjau lokasi banjir di Denpasar, Bali. ANTARA/HO-Humas Pemkot Denpasar

PEMERINTAH Kota Denpasar menyiapkan dana untuk penguatan ekonomi bagi pedagang atau pemilik usaha yang terdampak banjir di Kota Denpasar.

Hal itu disampaikan Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara usai menetapkan penurunan status darurat bencana di Posko Induk Penanganan Bencana,

Kantor Wali Kota Denpasar, Bali, Selasa.

Namun demikian, pemberian tersebut akan didahului dengan verifikasi dan validasi dengan dasar acuan adalah Identitas Kependudukan Denpasar.

Jumlah bantuan ekonomi tersebut pun tergantung dari jenis kerusakan setelah perhitungan

dari tim verifikator yang telah dibentuk oleh Pemkot Denpasar.

"Kita di Kota Denpasar berkomitmen untuk membantu para pemilik usaha, utamanya UMKM yang terdampak musibah banjir di Kota Denpasar," katanya.

Jaya Negara menjelaskan bantuan tersebut merupakan upaya berkelanjutan untuk mendukung penguatan dan pemulihan ekonomi pasca bencana.

Sehingga pemilik usaha dan UMKM dapat kembali tumbuh usai dilanda banjir.

"Kami berharap dengan adanya bantuan stimulus penguatan ekonomi ini dapat mendukung pelaku usaha dan UMKM bangkit kembali," katanya.

Secara teknis, Jaya Negara mengatakan bantuan bagi pelaku usaha dan UMKM terdampak banjir di Kota Denpasar akan dialokasikan dari APBD Kota Denpasar.

Sementara itu, khusus untuk pedagang Pasar Badung dan Pasar

Kumbasari akan dibantu langsung oleh Pemerintah Provinsi Bali yang dalam hal ini Gubernur Wayan Koster.

"Kita berbagi, di Pasar Badung dan Kumbasari dibantu Pak Gubernur atau Pemprov Bali. Selain itu, untuk pelaku usaha dan UMKM terdampak kita bantu dari APBD Pemkot Denpasar, semoga usaha kembali bangkit dan ekonomi pulih," ujar Jaya Negara.

Pemerintah Kota Denpasar secara resmi telah menurunkan status status Tanggap Darurat Bencana menjadi Status Transisi Darurat ke Pemulihan selama tiga bulan mulai Tanggal 17 September hingga 17 Desember 2025.

Selama rentang waktu tersebut, Pemkot Denpasar akan fokus pada pemulihan di beberapa sektor, yakni bidang pendidikan, bidang infrastruktur, bidang kesehatan dan bidang penguatan dan pemulihan ekonomi. (ant)

Pemkab Gianyar Kembangkan Digitalisasi Perlindungan Pekerja Migran

PEMERINTAH Kabupaten (Pemkab) Gianyar, Bali, mengembangkan digitalisasi Sistem Integratif Gianyar Aman Pekerja (SIGAP) untuk melindungi Pekerja Migran Indonesia (PMI) dari daerah tersebut.

"Kami ingin memastikan setiap langkah warga kami di luar negeri disertai rasa aman," kata Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Gianyar I Ketut Mudana di sela peluncuran sistem tersebut di Gianyar, Selasa.

Sistem itu, kata dia, menjamin transparansi, akuntabilitas, dan pelayanan terpadu, bagi calon pekerja migran Indonesia, keluarga, desa, dan instansi pemerintah.

Masyarakat dapat mengakses situs sigappmigi.gianyar.com dengan sejumlah fitur yang dirancang sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan, mulai dari manajemen administrasi

desa, pendataan warga, pelaporan cepat, hingga pemantauan bantuan sosial.

SIGAP, kata dia, memberikan ruang bagi aparat desa untuk bekerja lebih cepat, lebih cermat, dan lebih akuntabel.

"Sistem ini menjadi tonggak penting dalam penguatan perlindungan pekerja migran dan Gianyar bisa menjadi contoh bagi daerah-daerah lain di Indonesia," imbuhnya.

Sementara itu Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Gianyar I Gede Suardana Putra menyampaikan tujuan utama dari sistem itu yakni pendataan PMI secara riil berbasis desa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 dan Perda PMI Krama Gianyar.

Kemudian tujuan lainnya, kata dia, yakni meningkatkan koordinasi lintas instansi dalam perlindungan pekerja migran, mengawasi secara periodik data PMI, purna-PMI berbasis desa,



Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gianyar, Bali, meluncurkan digitalisasi Sistem Integratif Gianyar Aman Pekerja (SIGAP) untuk melindungi pekerja migran Indonesia di Gianyar, Bali, Selasa (16/9/2025). ANTARA/HO-Pemkab Gianyar

menangani aduan dan kasus PMI secara cepat dan terintegrasi.

Selain itu memberikan layanan informasi secara cepat baik kepada pimpinan maupun masyarakat terhadap data PMI di Kabupaten Gianyar.

"Sistem itu hadir sebagai

inovasi pemerintah dalam memberikan perlindungan yang lebih baik bagi para pekerja migran. Sistem ini mengintegrasikan data dari berbagai instansi dan memungkinkan pelaporan serta penanganan kasus PMI secara lebih cepat, transparan, dan terkoordinasi," imbuhnya. (ant)

Pemkab Tabanan Salurkan Bantuan Logistik ke Warga Terdampak Banjir



Penampakan rumah warga yang roboh akibat diterjang banjir di Tabanan, Bali. ANTARA/HO-Humas Pemkab Tabanan

PEMERINTAH Kabupaten Tabanan, Bali menyalurkan bantuan logistik kepada warga terdampak banjir dan longsor yang terjadi pada Rabu (10/9).

"Penyaluran (bantuan logistik) ini dilakukan untuk meringan-

kan beban masyarakat yang terdampak bencana sekaligus memastikan kebutuhan dasar tetap terpenuhi," ujar Bupati Tabanan I Komang Gede Sanjaya di Tabanan, Minggu.

Bantuan logistik tersebut dis-

erahkan Pemkab Tabanan kepada warga terdampak bencana di dua lokasi, yakni Perumahan Pano-rama dan Perumahan Lembah Jati di Sanggulan, Kecamatan Kediri, Tabanan.

La mengatakan bantuan logistik yang diberikan kepada warga terdampak banjir di daerah itu, berupa sembako dan kebutuhan sehari-hari.

La menambahkan bantuan ini merupakan bentuk perhatian pemerintah kepada masyarakat yang sedang menghadapi musibah.

"Kami di Pemerintah Kabupaten Tabanan hadir untuk masyarakat dalam kondisi apapun, terlebih saat tertimpa bencana. Bantuan ini mungkin belum sepenuhnya mencukupi, namun diharapkan dapat meringankan beban dan memberikan semangat kepada warga agar tetap kuat dan tabah menghadapi situasi ini,"

kata Gede Sanjaya.

Kepala Pelaksana BPBD Tabanan I Nyoman Srinada Giri mengatakan pasca-banjir dan longsor di daerah itu, BPBD Tabanan terus berupaya secara sigap dalam hal penanganan bencana, baik berupa evakuasi maupun pemberian bantuan logistik.

Kesiapsiagaan tersebut bagian dari tanggung jawab pihaknya dalam hal memastikan masyarakat terdampak bencana tetap mendapat perhatian pemerintah.

BPBD Tabanan mengajak masyarakat untuk terus meningkatkan kewaspadaan, terutama saat musim hujan, serta terus mengedepankan semangat gotong royong dalam menghadapi bencana.

"Kami juga terus melakukan pemantauan di lapangan untuk mengantisipasi kemungkinan bencana susulan," kata dia. (ant)

Pemkab Badung Naikkan Plafon Program Subsidi Kredit Usaha Mikro

Pemerintah Kabupaten Badung, Bali, menaikkan plafon pinjaman modal pada Program Subsidi Kredit Usaha Mikro Badung Sejahtera (Sidi Kumbara) dari sebelumnya maksimal Rp25 juta menjadi Rp100 juta.

“Kami berkomitmen untuk berpihak kepada para pelaku usaha mikro dan pengembangan plafon program ini kami harapkan dapat mengembangkan usaha mikro di Badung,” ujar Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa di Mangupura, Kabupaten Badung, Bali, Minggu.

Ia menjelaskan usaha mikro merupakan salah satu yang akan menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Badung.

Dengan adanya pengembangan atau penambahan plafon kredit tersebut pihaknya meyakini masyarakat yang bergerak di usaha mikro akan bersemangat untuk terus bertumbuh.

“Program ini tidak saja untuk membantu meningkatkan pen-

dapatan bagi pelaku usaha mikro namun juga memberikan ruang untuk memperluas kesempatan kerja,” kata dia.

Bupati Adi Arnawa mengungkapkan untuk target Sidi Kumbara pada tahap kedua ini ditetapkan 70 kreditur bagi yang mengambil kredit Rp100 juta serta 50 kreditur untuk yang Rp25 juta.

Kedepannya Pemkab Badung juga akan tetap melakukan evaluasi dan terus mengembangkan program subsidi itu menyesuaikan dengan kapasitas fiskal di Kabupaten Badung.

“Pada program ini semua biaya dibayar oleh pemerintah, dari pihak pengusaha mikro hanya membayar pokoknya saja. Nanti



Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa didampingi Wakil Bupati Bagus Alit Sucipta menyerahkan subsidi kredit UMKM di Badung, Bali. ANTARA/HO-Humas Pemkab Badung

tentu kami akan duduk bersama BPD Bali, OJK, BI, dan Jamkrida untuk pengembangannya,” ungkapnya.

Plt. Kepala Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Badung AA. Ngurah Raka Sukadana menambahkan pihaknya menjalin kerja sama dengan BPD

Bali untuk mengembangkan program Sidi Kumbara.

“Program ini kami harapkan dapat memfasilitasi peningkatan akses permodalan bagi UMKM di Kabupaten Badung yang pada akhirnya dapat meningkatkan daya saing serta pendapatan UMKM,” kata dia. (adv)

Pemkab Badung Finalisasi Pendataan Potensi Pajak Daerah



Bupati Badung Wayan Adi Arnawa (kedua kiri) memimpin rapat finalisasi laporan akhir pendataan potensi pajak daerah di ruang Kertha Gosana, Puspem Badung, Bali, Senin (1/9/2025). ANTARA/HO-Humas Pemkab Badung

PEMERINTAH Kabupaten Badung, Bali, melakukan finalisasi laporan akhir pendataan potensi pajak daerah yang telah dilakukan selama 45 hari.

“Setelah tahapan monitoring dan evaluasi ini berakhir maka akan dilanjutkan dengan

beberapa tahapan seperti validasi potensi pajak, penerbitan NPWPD/NOPD, penetapan nilai pajak daerah dan penagihan pajak daerah,” ujar Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa di Mangupura, Kabupaten Badung, Senin.

Dari laporan hasil pendataan

potensi pajak, Pemkab Badung memiliki target awal sebanyak 40.060 usaha. Namun, setelah pendataan selama 45 hari, total terdapat 46.074 dan hasil quality control menjadi sebanyak 42.294 atau 3.780 data dibersihkan.

Selanjutnya, hasil quality control tersebut terdiri dari sudah wajib pajak 8.588, potensi pajak baru 19.829 dan belum potensi pajak 13.905.

Bupati Adi Arnawa mengungkapkan dirinya mengapresiasi seluruh petugas yang telah melakukan pendataan di lapangan dengan hasil maksimal berhasil mendata 19 ribu lebih potensi pajak baru.

Diharapkan dari data itu, Bapenda bersama Tim Teknis Optimalisasi Pajak Daerah diharapkan dapat segera melakukan tindak lanjut untuk validasi potensi pajak sehingga dapat diterbitkan NPWPD/NOPD.

“Kami sangat senang dengan

kerja keras, komitmen dan loyalitas dari teman-teman petugas pendataan. Kedepannya kami berharap ini agar tetap dilanjutkan untuk mendapat potensi pajak baru,” kata dia.

Kepala DPMPSTP Made Agus Aryawan menjelaskan seluruh perangkat daerah yang terlibat telah mencapai realisasi pendataan 100 persen dengan tepat waktu.

Berdasarkan pendataan itu pihaknya mendapatkan temuan-temuan usaha baru sehingga realisasi pendataan potensi pajak daerah melebihi dari target awal.

“Hasil pendataan ini sudah melalui tahapan quality control, sehingga memperkecil terjadinya kesalahan. Kami juga mendapatkan kendala di lapangan yaitu tidak bertemu dengan pemilik usaha atau penanggung jawab sehingga perlu dilakukan validasi sebelum penerbitan NPWPD/NOPD,” kata dia. (adv)

Perumda Tirta Mangutama Badung Optimalkan Jaringan Distribusi Air

PERUMDA Tirta Mangutama Kabupaten Badung, Bali bersama PT Pipa Ticini Bali menyepakati proyek strategis optimalisasi jaringan distribusi air minum dengan skema kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha model "Build-Transfer-Operate".

"Kerja sama ini merupakan langkah awal dari upaya PDAM dalam pemenuhan kebutuhan air di Badung Selatan. Kami berkomitmen untuk mempercepat pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat khususnya ketersediaan air bersih ini," ujar Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa dalam keterangannya di Mangu-pura, Kabupaten Badung, Kamis.

Ia mengatakan proyek tersebut sebagai upaya konkret pemenuhan pelayanan dasar sekaligus menopang keberlanjutan pariwisata.

Menurut dia, keberadaan jaringan baru diharapkan mampu memperkuat suplai air ke kawasan paling padat dan kritis.

"Dengan adanya kerja sama ini kami mulai melangkah untuk pemasangan jaringan perpipaan dari Estuary Dam yang direncanakan akan dipasang hingga ke Nusa Dua," kata dia.

Bupati Adi Arnawa menjelaskan, dengan adanya jaringan khusus di bawah laut menuju Nusa Dua, suplai air ke wilayah Badung Selatan diharapkan semakin bertambah.

"Sehingga kebutuhan air masyarakat di wilayah Badung Selatan dapat terpenuhi paling tidak untuk jangka waktu lima tahun ke depan," kata dia.

Ia mengungkapkan saat ini penting untuk diversifikasi sumber air karena wilayah Badung sebagai pusat pariwisata di Bali menghadapi tantangan terkait keterbatasan air permukaan dan peningkatan kebutuhan air bersih seiring pesatnya pembangunan.

Dalam konteks tersebut, menurut Bupati Adi Arnawa, desalinasi atau pengolahan air laut menjadi



Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa. ANTARA/HO-Humas Pemkab Badung

air minum dipandang sebagai salah satu solusi strategis jangka panjang.

"Saat ini kami masih memanfaatkan air permukaan yang ketersediaannya sangat terbatas. Oleh karena itu, saya minta dilakukan diversifikasi dengan memanfaatkan air laut, agar tidak

lagi kewalahan dalam memenuhi kebutuhan air, baik untuk masyarakat umum maupun untuk sektor pariwisata," ungkap dia.

Pada kerja sama tersebut pipa akan dipasang melewati jalan tol, terowongan, laut, dan infrastruktur lain termasuk dengan Pertamina, PLN, dan Telkom. (adv)

Pemkab Badung Alokasikan Anggaran Rp16,6 M untuk Trans Metro Dewata



Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa menandatangani naskah perjanjian kerjasama antara Pemprov Bali dan Pemkab Badung tentang penyelenggaraan angkutan umum perkotaan Trans Metro Dewata di kawasan Sarbagita tahun 2026 di Gedung Kertha Sabha, Rumah Jabatan Gubernur Bali, Kamis (4/9/2025). ANTARA/HO-Humas Pemkab Badung

PEMERINTAH Kabupaten Badung, Bali, mengalokasikan anggaran sebesar Rp16,6 miliar untuk operasional angkutan

umum perkotaan Trans Metro Dewata pada tahun 2026.

"Kami bersama Pemerintah Provinsi Bali dan pemerintah

kota/kabupaten lain di Bali berkomitmen untuk mendorong tumbuhnya transportasi publik," ujar Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa di Denpasar, Kamis.

Anggaran tersebut juga telah disepakati saat penandatanganan naskah perjanjian kerja sama antara Pemprov Bali dan Pemerintah Kota Denpasar, Kabupaten Badung, Kabupaten Gianyar dan Kabupaten Tabanan (Sarbagita) tentang penyelenggaraan angkutan umum perkotaan Trans Metro Dewata.

Berdasarkan perhitungan total anggaran yang dibutuhkan untuk operasional Trans Metro Dewata pada 2026 sebesar Rp56,3 miliar yang dibagi Pemprov Bali menanggung 30 persen dan daerah Sarbagita 70 persen atau Rp39,4 miliar.

Jumlah tersebut terbagi oleh Pemkab Badung Rp16,6 miliar,

Pemkot Denpasar Rp15,5 miliar, Pemkab Gianyar Rp5,3 miliar dan Pemkab Tabanan Rp1,6 miliar.

Bupati Adi Arnawa mengungkapkan nantinya operasional angkutan tersebut juga akan tetap dievaluasi sehingga lebih efektif dan efisien dari sisi anggaran.

"Jika dilihat dari persentase capaian dari Bus Trans Metro Dewata belum maksimal, bahkan baru mencapai 37 persen," ungkap dia.

Gubernur Bali Wayan Koster menjelaskan penandatanganan perjanjian kerja sama itu bukan hal baru, namun lanjutan dari kerja sama yang telah berjalan dari tahun 2025 lalu.

"Perjanjian kerja sama ini untuk pelaksanaan di tahun 2026, sehingga dalam penyusunan APBD 2026 dapat mengalokasikan untuk Trans Metro Dewata tersebut," kata dia. (adv)



Wakil Bupati Badung Bagus Alit Sucipta (ketiga kanan) bersama Kapolres Badung AKBP M. Arif Batubara (ketiga kiri). ANTARA/HO-Humas Pemkab Badung

Pemkab Badung Perkuat Sinergi Dengan Unsur Masyarakat Jaga Kamtibmas

PEMERINTAH Kabupaten Badung, Bali, perkuat sinergi dengan berbagai unsur masyarakat untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat kamtibmas di wilayah tersebut.

“Sangat penting bagi kami bersama untuk menjaga keamanan, ketertiban serta kenyamanan di wilayah Kabupaten Badung,” ujar Wakil Bupati Badung Bagus Alit Sucipta dalam keterangan yang di-

terima di Mangupura, Kabupaten Badung, Bali, Minggu.

Pihaknya bersama Kapolres Badung AKBP M. Arif Batubara juga telah bertemu dengan Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Badung dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Jarak Bali untuk berdiskusi terkait kamtibmas.

Wabup Bagus Alit Sucipta mengungkapkan dirinya men-

gapresiasi kinerja jajaran Polres Badung dan upaya dari LSM dan mahasiswa dari kampus di Badung yang telah berkontribusi dalam upaya menjaga keamanan dan ketertiban wilayah.

Menurut dia, sebagai daerah destinasi pariwisata internasional, wilayah Badung wajib dapat menjaga keamanan dan ketertiban untuk kenyamanan masyarakat maupun wisatawan yang berkunjung.

Ia menambahkan Pemkab Badung bersama dengan berbagai pemangku kepentingan masyarakat dan komponen masyarakat akan terus berupaya menjaga keamanan dan ketertiban.

“Semoga ke depannya sinergitas dan kolaborasi ini bisa tetap terjalin untuk masyarakat Kabupaten Badung,” pungkas Wabup Bagus Alit Sucipta. (adv)

Pemkab Badung Tingkatkan Beragam Program Untuk Tekan Angka Kemiskinan



Wakil Bupati Badung Bagus Alit Sucipta saat mengikuti rakor pengendalian inflasi tahun 2025 secara daring di Ruang Nayaka Gosana I, Puspem Badung, Senin (8/9/2025). ANTARA/HO-Humas Pemkab Badung

PEMERINTAH Kabupaten (Pemkab) Badung, Bali, berupaya terus meningkatkan berbagai program yang dirancang guna menekan angka kemiskinan di wilayah tersebut, mulai dari pemberdayaan hingga penyediaan lapangan kerja.

“Kami terus berupaya menekan angka kemiskinan melalui peningkatan program pemberdayaan, penyediaan lapangan kerja, serta pengendalian inflasi yang stabil,” ujar Wakil Bupati (Wabup) Badung Bagus Alit Sucipta saat mengikuti rakor pengendalian

inflasi tahun 2025 secara daring di Mangupura, Kabupaten Badung, Bali, Senin.

Pada rapat koordinasi yang dipimpin Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian itu membahas tentang pengendalian inflasi dan penanggulangan kemiskinan.

Wabup Bagus Alit Sucipta menjelaskan upaya dalam menurunkan angka kemiskinan harus dilakukan melalui berbagai program yang berdampak langsung pada masyarakat.

“Dengan begitu nantinya kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat di wilayah Badung akan terus meningkat,” kata dia.

Ia mengatakan Pemkab Badung juga berkomitmen untuk terus menjalankan berbagai program yang prorakyat serta menjaga keberlanjutan pembangunan yang inklusif.

“Fokus kami adalah memastikan seluruh masyarakat baik yang tinggal di wilayah perkotaan maupun pedesaan benar-benar merasakan manfaat pembangunan,” kata Wabup Bagus Alit Sucipta.

Dalam instruksi Mendagri, Tito Karnavian meminta para kepala daerah agar mengoptimalkan pelaksanaan pengentasan kemiskinan.

Kepala daerah juga diminta untuk mengendalikan situasi dan menjaga keamanan serta ketertiban di daerah masing-masing, meningkatkan program pro-rakyat, dan mengoptimalkan pelaksanaan pengentasan kemiskinan.

“Dengan demikian kita dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mencapai target penurunan kemiskinan sebesar 0,86 persen per tahun,” ucap dia. (adv)

Wabup Badung Tanam Pohon Kelapa Dukung Program Ketahanan Pangan

WAKIL Bupati Badung, Bali, Bagus Alit Sucipta mendukung program ketahanan pangan yang dilakukan dengan menanam pohon kelapa pada program penanaman 360.000 bibit pohon kelapa serentak di seluruh Indonesia.

“Kegiatan ini merupakan momentum penting dalam upaya meningkatkan ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat,” ujar Wabup Badung Bagus Alit Sucipta di Mangupura, Kabupaten Badung, Bali, Selasa.

Ia mengatakan pohon kelapa sangat berguna bagi masyarakat Kabupaten Badung yang mayoritas beragama Hindu.

Menurut dia, kelapa mulai dari buah hingga daunnya sering dimanfaatkan untuk sesajen dan batang pohonnya juga masih bisa dimanfaatkan masyarakat

untuk membuat kerajinan.

Pada kesempatan tersebut, Wabup Bagus Alit Sucipta juga menyerahkan 1.000 bibit pohon kelapa kepada sejumlah perwakilan masyarakat di kawasan Desa Sobangan, Badung.

“Kami berterima kasih kepada Menteri Imigrasi dan Pemasaran atas program yang mendukung ketahanan pangan ini,” kata dia.

Kepala Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Denpasar Gede Dudy Duwita menjelaskan kegiatan itu diselenggarakan sebagai bagian dukungan Kementerian Imipras terhadap Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.

Penanaman pohon kelapa dinilai memiliki makna strategis, mengingat kelapa adalah tanaman serbaguna yang memberikan manfaat luas bagi kehidupan masyarakat, sekaligus men-



Wakil Bupati Badung Bagus Alit Sucipta menanam pohon kelapa serentak di Mengwi, Badung, Kabupaten Badung, Selasa (9/9/2025). ANTARA/HO-Humas Pemkab Badung

dukung ketahanan dan kemandirian bangsa di berbagai sektor.

“Kegiatan ini juga menjadi momentum untuk memperkuat kolaborasi antar instansi pemerintah dengan masyarakat,

sehingga keberadaan kami tidak hanya berfokus pada tugas pokok dan fungsi keimigrasian tetapi juga berkontribusi dalam program pembangunan nasional,” kata dia. (adv)

Bupati Badung Instruksikan Evaluasi Tata Ruang Untuk Cegah Banjir

BUPATI Badung Wayan Adi Arnawa menginstruksikan evaluasi tata ruang sebagai langkah pencegahan bencana banjir.

“Pemanfaatan ruang tidak boleh hanya berorientasi pada sisi komersial, tetapi juga memperhatikan aspek lingkungan dan fungsi alami aliran sungai,” ujar Bupati Adi Arnawa saat meninjau lokasi terdampak banjir di kawasan Mengwitani, Kabupaten Badung, Bali, Kamis.

Ia mengatakan selama ini mungkin jalur-jalur air sering diabaikan, sedangkan ketika ruang aliran sungai dipersempit atau ditutup, tentu dampaknya akan menyebabkan bencana banjir seperti yang terjadi saat ini.

“Untuk itu, saya sudah minta camat dan kepala desa untuk berkoordinasi, termasuk akan memanggil pihak terkait

guna mengevaluasi pemanfaatan ruang di Badung,” kata dia.

Bupati Adi Arnawa menjelaskan untuk penanganan jangka panjang, dirinya juga memberikan atensi terhadap penyempitan aliran sungai di kawasan Central Parkir, Jalan Dewi Sri Kuta.

Berdasarkan laporan Dinas PUPR Badung, pelebaran aliran sungai tersebut telah dijadwalkan tahun 2026.

Namun, ia meminta agar proses percepatan dilakukan melalui anggaran penanganan darurat banjir.

“Kalau memang kondisinya mendesak, jangan menunggu 2026. Kami bisa menggunakan anggaran darurat untuk segera melebarkan aliran sungai itu. Langkah cepat harus dilakukan,” kata dia.

Ia menambahkan, untuk membantu warga yang terdampak bencana banjir yang terjadi Rabu (10/9), pihaknya juga telah menyiapkan langkah-langkah darurat untuk membantu warga terdampak.

“Situasi seperti itu harus diatensi.

Saya sudah perintahkan aparat desa bersama BPBD untuk memastikan kebutuhan warga tetap diperhatikan,” pungkas Bupati Adi Arnawa. (adv)



Bupati Badung Wayan Adi Arnawa. ANTARA/HO-Humas Pemkab Badung

Perumda Tirta Mangutama Tingkatkan Layanan Air di Badung Selatan

PERUMDA Air Minum Tirta Mangutama Kabupaten Badung, Bali memulai pembangunan jaringan distribusi pipa bawah laut untuk meningkatkan layanan bagi pelanggan di kawasan Badung Selatan.

"Jaringan distribusi pipa bawah laut dari instalasi pengolahan Air Estuary menuju Nusa Dua ini merupakan upaya untuk menambah layanan air terutama di wilayah Badung Selatan," ujar Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa di Mangupura, Kabupaten Badung, Bali, Kamis.

Ia mengatakan pihaknya berkomitmen terus meningkatkan layanan untuk memenuhi kebutuhan air di Wilayah Badung Selatan karena selama ini terdapat kendala dalam distribusi air menuju wilayah itu.

"Mudah-mudahan ini selesai sesuai dengan jadwal. Rencananya akhir tahun ini sudah bisa berjalan, sesuai yang saya janjikan bahwa pemenuhan kebutu-

han air untuk di Badung Selatan akan bisa terpenuhi," kata dia.

Bupati Adi Arnawa mengungkapkan pihaknya optimistis dengan peningkatan layanan yang diberikan maka otomatis pendapatan Perumda Air Tirta Mangutama juga akan meningkat.

"Kami yakin sekali karena penambahan debit air otomatis juga memenuhi kebutuhan konsumen karena konsumen di Badung Selatan itu rata-rata disamping masyarakat ada juga konsumen akomodasi pariwisata," ungkap dia.

Direktur Utama Perumda Air Minum Tirta Mangutama I Wayan Suyasa menjelaskan pembangunan infrastruktur jaringan pipa bawah laut ini merupakan kerja sama business to business (B to B).

Kerja sama itu dilakukan antara Perumda air minum Tirta Mangutama dengan PT. Tiara Cipta Nirwana dengan badan



Bupati Badung Wayan Adi Arnawa meletakkan batu pertama pembangunan Jaringan Distribusi Pipa Bawah Laut di IPA Estuary, Perumda Air Minum Tirta Mangutama Badung, Jalan By pass Ngurah Rai, Badung, Kamis (11/9/2025). ANTARA/HO-Humas Pemkab Badung

usaha pelaksana PT. Pipa Ticini.

Jaringan pipa bawah laut itu dibangun dari IPA Estuary menuju Nusa Dua sepanjang 7.700 meter dengan pipa HDPE diameter 800 mm dapat mengalirkan air sebesar 350 lps sampai dengan 600 lps.

"Pipa distribusi ini dipasang untuk menambah suplai air minum ke Badung Selatan. Saat ini tersedia pipa eksisting 600 mm dari IPA Estuary menuju Pecatu dan Nusa Dua dan sudah tidak dapat ditingkatkan lagi pengalirannya," kata dia. (adv)

Pemkab Badung-Kemenkum Bali Kerja Sama Tingkatkan Pelayanan Hukum



Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa (tengah) dan Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Bali Eem Nurmanah (kiri) menunjukkan dokumen penandatanganan nota kesepakatan dan rencana kerja kedua lembaga tersebut, di Puspem Badung, Bali, Kamis (11/9/2025). ANTARA/HO-Humas Pemkab Badung

PEMERINTAH Kabupaten (Pemkab) Badung menjalin kerja sama dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Provinsi Bali dalam upaya meningkatkan kualitas produk hukum dan pelayanan hukum di wilayah tersebut.

"Kami membutuhkan pendampingan dalam meningkatkan sumber daya manusia guna melahirkan produk-produk hukum yang berkualitas dan dapat memberikan kenyamanan serta keamanan dalam menjalankan program-program strategis,"

ujar Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa di Mangupura, Kabupaten Badung, Kamis.

Ia mengatakan sinergitas tersebut dituangkan dalam penandatanganan memorandum of understanding (MoU) dan rencana kerja tentang sinergitas program dan kegiatan pembentukan peraturan perundang-undangan, pembinaan hukum serta pelayanan hukum.

Kesepakatan itu mencakup konsolidasi pelayanan hukum dan HAM dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Badung.

Layanan itu khususnya berkaitan dengan permohonan pendaftaran kekayaan intelektual personal, penyelenggaraan pelayanan publik, pembentukan produk hukum daerah, peningkatan kesadaran hukum masyarakat dan pengembangan jaringan dokumentasi informasi hukum.

Menurut Wayan, nota kesepahaman itu diajukan seiring adanya perubahan nomenklatur

Kemenkumham menjadi Kemenkum, sehingga dipandang perlu melakukan penyesuaian terhadap nota kesepakatan yang sudah pernah ditandatangani.

"Kami berharap sinergi yang telah terbangun ini dapat memberikan kontribusi yang besar dalam rangka mempercepat pembangunan diberbagai sektor di Badung," kata dia.

Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Bali Eem Nurmanah mengatakan kesepakatan itu diharapkan menjadi langkah nyata dalam mewujudkan pelayanan hukum di Badung yang semakin berkembang dan memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat.

"Dengan adanya pembahasan nota kesepakatan ini kami berharap terwujud transformasi pelayanan hukum yang lebih profesional, transparan dan mampu menjawab kebutuhan hukum masyarakat di era modern," kata dia. (adv)

Pemkab Badung Perkuat Tata Kelola Ruang Untuk Cegah Bencana

PEMERINTAH Kabupaten Badung, Bali, berkomitmen memperkuat tata kelola ruang lingkungan hidup yang keberlanjutan untuk mencegah bencana alam, seperti banjir yang terjadi Rabu (10/9).

"Bencana ini merupakan peringatan keras bagi kami semua. Ke depannya pola hidup dan perilaku harus berubah dan lebih berpihak pada kelestarian lingkungan," ujar Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa saat meninjau posko penanganan bencana di kawasan Kuta, Kabupaten Badung, Minggu.

Ia mengatakan pembangunan di Badung ke depan harus mengedepankan keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan daya dukung lingkungan.

Menurut dia, ruang terbuka hijau akan menjadi prioritas strategis, terutama di kawasan dengan kepadatan pembangunan tinggi, seperti Kuta Utara hingga Badung

Selatan.

Untuk itu, Pemkab Badung berkomitmen menjalankan program penghijauan di hulu sungai, pembangunan sodetan baru, serta mengevaluasi izin bangunan di bantaran sungai yang berpotensi mempersempit aliran air.

"Kami tidak boleh lagi hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi. Tanpa ekologi yang terjaga, keberlanjutan pembangunan dan citra Badung sebagai destinasi wisata Internasional akan terancam," kata dia.

Ia menjelaskan banjir yang melanda wilayah itu tidak hanya dipicu oleh curah hujan ekstrem, tetapi juga diperparah oleh faktor teknis.

Hasil kajian konstruksi menunjukkan adanya penyempitan saluran air di kawasan Sentral Parkir Kuta yang menjadi titik penyumbatan.

"Kami telah menyiapkan rencana pembebasan lahan warga



Gubernur Bali Wayan Koster buat larangan alih fungsi lahan usai dapat arahan Menteri LH di Denpasar, Minggu (14/9/2025). (ANTARA/Ni Putu Putri Muliantari)

seluas satu are pada tahun 2026 dengan alokasi anggaran sekitar Rp6 miliar. Dengan langkah ini, saluran air dapat dilebarkan sehingga aliran menuju laut lebih lancar," kata dia.

Ia menambahkan perubahan perilaku masyarakat dalam menjaga ekosistem sungai juga penting dilakukan untuk mencegah

terjadinya bencana.

"Masalah sederhana seperti sampah justru menimbulkan dampak besar. Pemerintah telah menyiapkan fasilitas pengelolaan seperti TPS3R dan TPST. Namun, tanpa budaya disiplin lingkungan, seluruh fasilitas tersebut tidak akan efektif," demikian Adi Arnawa. (adv)

Pemerintah Perluas Program MBG di Bangli Guna Dukung SDM Unggul



Para pelajar SMK Negeri 4 Bangli menerima program makan bergizi gratis (MBG) di Kabupaten Bangli, Bali, Senin (8/9/2025). ANTARA/HO-Pemkab Bangli

PEMERINTAH memperluas cakupan penerima Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Bangli, Bali, untuk mendukung salah satu investasi jangka panjang mendorong Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul.

"Mereka lebih fokus dalam be-

lajar karena kebutuhan energinya sudah terpenuhi," kata Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Bangli I Nyoman Arsana di Bangli, Bali, Senin.

Secara bertahap pemerintah menjangkau penerima manfaat, salah satunya pelajar di sembilan

kabupaten/kota di Pulau Dewata, yang saat ini menyasar Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 4 Bangli.

Sebanyak 728 siswa dan siswi di sekolah itu menerima makan bergizi yang dinikmati saat jam istirahat makan siang.

Arsana berharap Program MBG bisa berkelanjutan dan menyasar lebih banyak pelajar khususnya di Kabupaten Bangli.

Dengan asupan gizi yang memadai, lanjut dia, diharapkan konsentrasi dan prestasi belajar siswa akan meningkat, sehingga menghasilkan lulusan-lulusan yang kompeten.

Sejak diluncurkan secara bertahap di beberapa sekolah di kabupaten Bangli, ia menjelaskan Program MBG telah memberikan dampak positif dan para siswa kini bisa mendapatkan asupan makanan yang seimbang dan teratur.

"Langkah ini merupakan investasi jangka panjang dalam menciptakan sumber daya manu-

sia unggul yang akan memimpin Indonesia pada masa depan," ucapnya.

Selain itu program tersebut juga mendorong orang tua para pelajar untuk menyisihkan uang menggantikan bekal makan siang dalam bentuk tabungan pelajar atau generasi muda.

Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto melaporkan capaian Program MBG telah menjangkau 20 juta anak sekolah, anak belum sekolah, ibu hamil, dan ibu menyusui di seluruh Indonesia hingga 15 Agustus 2025.

Kepala Negara menyebutkan hingga periode tersebut sudah ada 5.800 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di 38 provinsi di Indonesia.

Program MBG juga telah menciptakan 290.000 lapangan kerja baru di dapur-dapur dan melibatkan satu juta petani, nelayan, peternak, dan UMKM, sehingga program itu mendorong pertumbuhan ekonomi di desa-desa. (ant)

Penglingsir Puri Mohon Presiden RI Realisasikan Bandara Bali Utara

PARA Penglingsir (Tokoh) Puri se-Bali yang tergabung dalam Paiketan Puri-Puri Se-Jebag Bali (P3SB), yang berjumlah 13 raja dari puri-puri seluruh Bali meminta Presiden RI Prabowo Subianto untuk merealisasikan Bandara Internasional Bali Utara di Kabupaten Buleleng, Bali.

Ketua Harian P3SB Tjokorda Putra Nindya yang juga Penglingsir Puri Agung Peliatan di Kabupaten Gianyar, Senin mengatakan masyarakat perlu mendapatkan kepastian terkait pembangunan Bandara Bali Utara setelah Presiden Prabowo mengeluarkan Perpres Nomor 12/2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029 yang ditandatangani pada 10 Februari 2025 lalu.

"Kami sudah lelah dengan wacana dan spekulasi. Isi Perpres No. 12 Tahun 2025 sudah sangat jelas menetapkan pembangunan proyek pembangunan bandara

ini letaknya di kawasan pesisir Kubutambahan, Buleleng," kata Tjokorda Putra.

Karena itu, Tjokorda Putra mewakili para Penglingsir Puri se-Bali memohon agar Presiden Prabowo Subianto segera memenuhi komitmen itu dengan melaksanakan groundbreaking atau peletakan batu pertama.

Peletakan batu pertama itu penting agar seluruh lapisan masyarakat tidak terus berspekulasi terkait pembangunan Bandara Bali Utara sebagai sebuah program strategis atau hanya sebagai janji politik semata.

Dalam pertemuan di Puri Ageng Blahbatu, Gianyar itu para Penglingsir Puri se-Bali, yang merupakan para raja dan tokoh adat pewaris kerajaan-kerajaan Bali, menilai proyek ini mendesak diwujudkan sebagai langkah strategis pemerataan pembangunan dan untuk menjawab kebutuhan infrastruktur transportasi udara



Para penglingsir puri se-Bali yang tergabung dalam Paiketan Puri-Puri Se-Jebag Bali (P3SB) memberikan keterangan pers terkait permohonan kepada Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto untuk merealisasikan Bandara Bali Utara saat pertemuan di Kabupaten Gianyar, Bali, Senin (15/9/2025). ANTARA/Rolandus Nampu.

yang tidak lagi mampu ditampung Bandara I Gusti Ngurah Rai di Bali bagian Selatan.

Tjokorda Putra menilai lokasi bandara di pesisir Kubutambahan, Buleleng sudah selaras dengan berbagai regulasi yang berlaku, antara lain Peraturan Menteri Perhubungan No. 20/2014 dan

Peraturan Menteri Perhubungan No. 64/2018 tentang Tata Cara Penetapan Lokasi Bandara. Selain itu, kawasan ini juga telah ditetapkan sebagai peruntukan bandara dalam Perda Provinsi Bali No. 18/2009 tentang RTRW yang diperbaharui melalui Perda No. 3 Tahun 2020. (ant)

Mendag Sebut Ratusan Desa di Indonesia Siap Ekspor Produk



Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso saat melepas ekspor kakao fermentasi dari Kabupaten Jembrana, Bali ke Prancis, Selasa (9/9/2025). ANTARA/Gembong Ismadi

MENTERI Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan sebanyak 700 desa di Indonesia sudah siap untuk mengekspor produknya ke sejumlah negara.

"Kami memetakan ribuan desa yang memiliki potensi ekspor. Dari ribuan itu, saat ini 700 desa siap melakukan ekspor," kata Mendag saat melepas ekspor

kakao fermentasi ke Prancis dari Kabupaten Jembrana, Bali, Selasa.

Dia mengatakan untuk menumbuhkan ekspor dari desa, pemerintah meluncurkan program Desa BISA Ekspor yang merupakan pengembangan dari Desa Devisa yang digagas Kementerian Keuangan.

Untuk menjalankan program

Desa BISA Ekspor tersebut, kata dia, sejumlah kementerian yaitu Kementerian Perdagangan, Kementerian Desa, Kementerian Pertanian serta Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) bekerjasama.

"Ada juga pihak swasta termasuk bank yang mendukung program ini. Kami buka akses yang luas bagi ekspor produk desa," katanya lagi.

Menurut dia, bagi desa yang sudah siap, pihaknya memfasilitasi dengan pembeli internasional melalui perwakilan dagang di 33 negara.

Sedangkan untuk desa yang belum siap, namun memiliki potensi, pihaknya membantu pelatihan, pendampingan desain dan standardisasi produk.

Agar bisa bersaing di pasar ekspor, kata dia, harus dilakukan hilirisasi produk desa sehingga memiliki nilai tambah.

"Pasar global itu luas dan be-

ragam. Ada segmen untuk bahan mentah, setengah jadi, maupun produk jadi. Kami akan bantu desa agar mampu masuk ke pasar produk jadi, meskipun secara bertahap," katanya pula.

Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Ahmad Riza Patria yang juga hadir mengatakan desa di Indonesia memiliki potensi besar sektor pertanian, budaya dan produk inovatif.

"Kita tidak boleh santai. Produk-produk desa harus terbaik kualitasnya, dalam jumlah yang banyak, dan cepat masuk ke pasar. Ini akan membuka lapangan kerja, meningkatkan ekonomi desa, dan pada akhirnya menyejahterakan masyarakat," katanya.

Bupati Jembrana I Made Kembang Hartawan mengatakan pihaknya berkomitmen terus mendampingi masyarakat desa agar mampu bersaing di level nasional maupun internasional. (ant)

DPRD Bali Tak Masalah Jika Mendagri Evaluasi Tunjangan Perumahan

DEWAN Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali menegaskan tidak masalah jika Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menginstruksikan pemerintah daerah mengevaluasi tunjangan perumahan bagi anggota dewan.

"Ya kan kami mengacu pada regulasi pusat, kalau memang regulasi pusat menentukan lain, ya kami ikuti karena kami di bawah Kementerian Dalam Negeri kan," kata Wakil Ketua DPRD Bali I Wayan Disel Astawa di Denpasar, Selasa.

Sebelumnya di Jakarta, Senin (15/9), Mendagri mengatakan telah menginstruksikan agar tunjangan perumahan yang diterima anggota DPRD dievaluasi.

Hal ini dilakukan demi mendengar suara rakyat, sekaligus karena kerap pada praktiknya tunjangan perumahan diberikan pemda sebagai alat kepentingan agar APBD tidak diganggu.

Di setiap daerah angkanya

berbeda, setelah tunjangan perumahan DPR RI sebesar Rp50 juta per bulan per anggota, ditemukan di daerah lain, seperti Jawa Tengah mencapai Rp79 juta, Jakarta Rp70 juta, Jawa Barat Rp71 juta, Jawa Timur Rp49 juta, dan Bali Rp54 juta.

Disel Astawa mengatakan di Bali hingga saat ini tidak ada perubahan nilai tunjangan perumahan dan anggota DPRD masih mendapat dengan nominal seperti biasanya.

Ketika disinggung soal berapa wajarnya kebutuhan dewan untuk tunjangan perumahan, ia mengatakan hal ini bukan soal kebutuhan, melainkan regulasi sehingga apapun hasil evaluasi sudah semestinya dijalankan.

"Mengikuti undang-undang, bukan buat berbicara masalah kebutuhan, undang-undangnya ada, dan kalau memang itu (tunjangan perumahan) nanti dihapus oleh pusat, ya kami mengikuti," ujar politisi asal



Wakil Ketua DPRD Bali I Wayan Disel Astawa tegaskan dewan di Bali tak masalah jika tunjangan perumahan dievaluasi Mendagri, Denpasar, Selasa 16/9/2025. ANTARA/Ni Putu Putri Muliartari

Kabupaten Badung itu.

Tak hanya soal tunjangan, arahan Mendagri Tito soal pejabat tak boleh pamer juga direspons setuju, bahkan pimpinan DPRD Bali akan berkomunikasi untuk memberi arahan ke jajaran agar bertindak sewajarnya di ruang publik.

"Kami pun tidak pernah ada flexing begitu, kan kita tidak ada flexing mobil mewah kan, tentu kita harus berharap pada semua anggota dengan kondisi ekonomi saat ini normal-normal saja lah, sehingga tidak ada ketersinggungan," kata Disel Astawa. (ant)



Arsip - Seorang guru membagikan makanan kepada siswa saat pelaksanaan Makan Bergizi Gratis (MBG) di SD Negeri 3 Delod Peken, Tabanan, Bali, beberapa waktu lalu. ANTARA FOTO/Nyoman Hendra Wibowo.

WAKIL Gubernur (Wagub) Bali I Nyoman Giri Prasta saat Upacara HUT Ke-80 Kemerdekaan RI mengajak masyarakat Bali menanamkan rasa nasionalisme sejak usia dini.

"Kalau untuk Bali pesannya menanamkan rasa nasionalisme yang kuat dari anak usia dini," kata dia di Denpasar, Minggu.

Upaya menanamkan nasionalisme sendiri sudah ditanamkan melalui kisah-kisah perjuangan seperti sejarah-perjuangan perang puputan, sehingga diharapkan semangat perjuangan itu terbangun di diri masyarakat Bali.

Giri Prasta yang bertindak sebagai Inspektur Upacara menyampaikan di era saat ini

Realisasi Anggaran MBG di Bali Capai Rp103,9 miliar

khususnya di Bali, agar rasa nasionalisme juga dapat diwujudkan dengan melanjutkan perjuangan para pahlawan melalui aktif berkarya.

Upacara peringatan HUT Ke-80 Kemerdekaan RI yang diadakan Pemprov Bali ini menjadi momentum untuk memaknai perjuangan para pahlawan dalam merebut kemerdekaan, sekaligus mengenang keberanian proklamator bangsa, Bung Karno dan Bung Hatta.

Saat ini, menurutnya perjuangan itu diteruskan dengan menuangkan ide, gagasan, serta cita-cita mereka sebagai pendiri bangsa.

"Jika para pahlawan kita berjuang merebut kemerdekaan dengan jiwa dan raga, maka saat ini kita wajib melanjutkan perjuangan tersebut dengan

melawan kebodohan serta mendukung pembangunan daerah demi kemajuan bersama," ujar mantan Bupati Badung itu.

"Terutama, kita harus hadir untuk warga Bali yang masih berada di bawah garis kemiskinan," sambungnya.

Giri Prasta mencontohkan implementasi nasionalisme itu seperti 72 anggota Paskibraka Provinsi Bali yang dalam Upacara HUT Ke-80 Kemerdekaan RI di Lapangan Niti Mandala Renon mengibarkan bendera Merah Putih dengan baik.

"Contoh nyata yang bisa kita lihat hari ini adalah para anggota Paskibraka, mereka tampil dengan semangat, rapi, dan solid, hal ini tentu membuat kita bangga akan kemampuan generasi muda yang mau berlatih dan mengembangkan diri," kata dia. (ant)